

**FENOMENA TIDAK MEMILIH (NON-VOTERS) DAN ALASAN PEMILIH
TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILUKADA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010 DI KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Rusdi Effendi

Abstract:

Elections in a democracy is one of the fundamental pillars of a process of accumulation willingness of the people. Elections are also a democratic procedure to elect the leader. Elections are the mechanism of power transformation (succession) is the most secure, when compared with other methods. Elections can be said is the fundamental pillar of a democracy. To select regional head and deputy regional head at the district level, was held Election Regional Head and Deputy Head of Region (Election) to select candidates for the Regent and Vice Regent as leaders at the local level. From the previous times elections, the elections and the General Election in Tanah Bumbu allegedly contained the presence of voters who did not vote (non-voters) tend to increase, because of that study was conducted to reveal a phenomenon not choose (non-voters) and Reasons the Voters are not voting in the general elections local Head and Deputy Head (Election) in the year 2010 in the District of Tanah Bumbu, South Kalimantan.

Keywords: Phenomenon, not chosen (non-voters), Reason Voters, Election.

PENDAHULUAN

Dalam konsep demokrasi, kekuasaan harus berasal dari rakyat dilaksanakan oleh dan untuk rakyat. Berangkat dari gagasan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dapatlah dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilihan umum adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang berikutnya dijadikan sebagai serpihan dari hak asasi setiap warga negara.

Sejak Pemilu terakhir Orde Baru 1997, masa Reformasi, Pemilu tahun 1999 hingga tahun 2010 berdasarkan hasil survei dan penelitian para pakar politik, dan pengamat perpolitikan di Indonesia, partisipasi politik pemilih menurun, angka pemilih tidak memilih (*non-voters*) atau Golongan Putih meningkat. Pada Pemilu legislatif tahun 2004 meningkat angka Golput menjadi 15,9 persen, Pilpres I (2004) naik lagi menjadi 21,8 persen dan Pilpres II (2004) naik lagi menjadi 23,4 persen dan Pemilu legislatif tahun 2009 meningkat lagi menjadi 29,1 persen. (Bismar Arianto, 2011:52). Angka tersebut belum peningkatan angka persentasi pemilih tidak memilih (*non-voters*) dengan menjamurnya Pemilukada di tiap provinsi, kabupaten/kota di Indonesia yang waktu penyelenggaraannya tidak bersamaan.

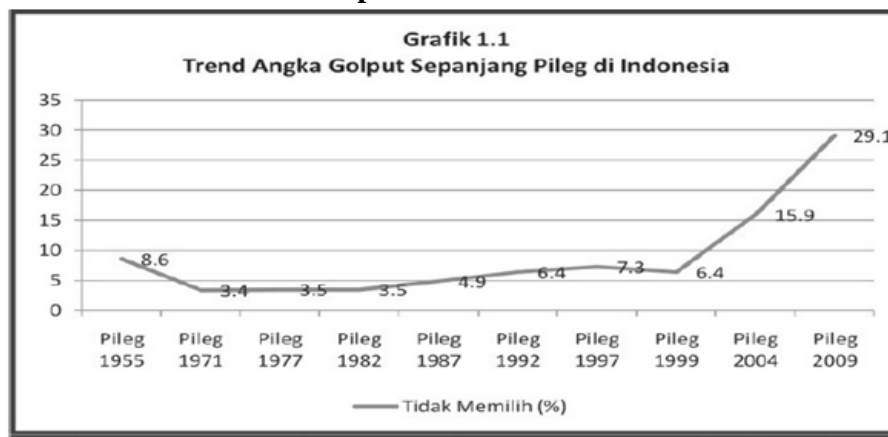
* Magister Pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 2013. Saat ini bertugas sebagai Tenaga Pengajar Pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Untuk melihat fenomena tersebut seperti dinyatakan Anthony Giddens (1999) dalam H. Soebagio (2008) :

“Haruskah kita menerima lembaga-lembaga demokrasi tersingkir dari titik di mana demokrasi sedang marak”. Tentunya potensi Golongan Putih dalam pesta demokrasi nasional maupun lokal tersebut kiranya cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas. Sebab potensi Golongan Putih yang menunjukkan eskalasi peningkatan dapat berimplikasi melumpuhkan demokrasi, karena merosotnya kredibilitas kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik. (H.Soebagio,2008:82-83).

Berikut Bismar Arianto (2011) memaparkan dalam grafiknya Trend Angka Golongan Putih Sepanjang Pemilu Legislatif di Indonesia dari tahun 1955 hingga tahun 2009 adalah pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1
Grafik Peningkatan Angka Golongan Putih Pada Pemilu Legislatif
Dari Tahun 1955 sampai Tahun 2009 di Indonesia



Sumber : Bismar Arianto dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No.1 Tahun 2011, hal.52.

Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan berdirinya tahun 2003 pemekaran dari Kabupaten Kotabaru sampai tahun 2010 telah 7 (tujuh) kali diselenggarakan Pemilu secara nasional, maupun lokal hingga Pemilu pada untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010. Dengan latar belakang tersebut diatas uniknya, bahwa setiap peristiwa penyelenggaraan Pemilu / Pemilu pada selalu diwarnai dengan adanya fenomena tidak memilih (*non-voters*) atau disebut Golongan Putih cenderung meningkat, sehingga perlu diteliti lebih mendalam keberadaan fenomena tersebut, berikut alasan-alasan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, fenomena ini memungkinkan terjadi dalam Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu.

Untuk mengungkapkan fenomena tidak memilih (*non-voters*) dan alasan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu pada Bupati dan Wakil bupati Tahun 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan selatan, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana gambaran pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak menggunakan hak pilihnya (*non-voters*) pada Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati (Putaran Pertama) Tanggal 2 Juni tahun 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu ?; (2) Alasan apa saja yang dianggap mendasar bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati (Putaran Pertama) tanggal 2 Juni 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu ?; (3) Bagaimana gambaran pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak menggunakan hak pilihnya (*non-voters*) atau dari hasil Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati (Putaran kedua) Tanggal 16 Agustus tahun 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu?; (4) Alasan apa saja yang dianggap mendasar bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar

Pemilih Tetap) untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati (Putaran Kedua) tanggal 16 Agustus 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu ?; dan (5) Apakah terdapat peningkatan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (*non voters*) dilihat dari hasil Partisipasi Politik dan tingkat Golongan putih antara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Putaran Pertama tanggal 2 Juni 2010 dengan hasil Pemilukada putaran kedua tanggal 16 Agustus 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu ?

Tujuan penelitian; Untuk mengetahui dan memberikan gambaran (deskripsi) adanya fenomena tidak memilih (*non-voters*) atau Golongan Putih dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati pada Putaran Pertama tanggal 2 Juni 2010 dan Putaran Kedua tanggal 16 Agustus 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu berikut alasan mendasar pemilih untuk tidak memilih.

Kegunaan secara teoritis; Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan bahan pemikiran, kajian, penelitian dan telaahan bersama tentang dinamika sosial dan perilaku pemilih dalam proses demokrasi dan keberadaan Hak Asasi Manusia Indonesia dalam realitas pelaksanaan Pemilihan Umum di tingkat lokal, sehingga menjadi acuan pemikiran lokal maupun secara nasional.

Kegunaan penelitian secara praktis; Bagi Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) sebagai kontribusi topik acuan materi pembelajaran, guna memberikan pemahaman bagi guru-guru IPS dan anak didik di semua jenjang pendidikan dari situasi sosial dan perilaku dinamika sosial masyarakat dalam Pemilukada, sebagai topik atau bahan / materi pendidikan, khususnya pemahaman bagaimana menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dalam berpartisipasi dalam Pemilukada, maupun Pemilu yang bersifat nasional lainnya untuk memilih pemimpin tingkat nasional, maupun lokal.

Materi Pemilukada akan memberikan alternatif pembelajaran berdemokrasi, menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), menghargai pendapat dan sikap orang lain dalam perbedaan pemikiran, latar belakang pendidikan, ekonomi, ras atau etnis dan agama, sekiranya dapat memilah mana yang baik dan tidak baik atau tindakan positif maupun negatif bagi guru dan siswa dalam pembelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konsep demokrasi dan Pemilu Nur Hidayat Sardini (2011) menegaskan, bahwa Pemilihan umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti bila dikatakan Pemilihan umum merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. (Nur Hidayat Sardini, 2011:1). Menurut Miriam Budiardjo (1983) menyatakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah Rule of Law ialah : (1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; (2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*); (3) Pemilihan umum yang bebas; (4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat; (5) Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi dan beroposisi; dan (6) Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). (Miriam Budiardjo, 1983:60).

Lebih lanjut Robert Dahl (1971) dalam Eka Suaib (2010) memberikan 8 (delapan) persyaratan lebih rinci dari demokrasi yakni : (1) Kebebasan membentuk dan bergabung dalam suatu asosiasi; (2) Kebebasan berekspresi; (3) Kebebasan hak suara; (4) Kebebasan untuk dipilih dalam jabatan politik; (5) Hak elit politik berkompetisi untuk mendapatkan dukungan dan suara; (6) Ada sumber alternatif informasi; (7) Pemilu yang bebas dan aktif; dan (8) Ada lembaga yang membuat kebijakan pemerintah, tergantung pada suara pemilih dan preferensinya. (Eka Suaib, 2010 :4).

Dalam konsep tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai citra demokrasi harapan warga negara dimana bekerja dalam negara yang demokratis (*Working in democracy state*) merupakan cita-cita semua orang yang mau hidup dinegara yang demokratis. Pada prinsip demokrasi yang paling penting ialah meletakkan kekuasaan ditangan rakyat, bukannya di tangan seorang penguasa. Seperti pernyataan Gutmann dan Thompson (1996) dalam Miftah Thoha (2010) bahwa, Sementara itu tidak ada rasa takut untuk memasuki suatu serikat atau perkumpulan yang sesuai dengan hati nurani dan kebutuhannya, selaras dengan tidak adanya rasa takut ini juga dikembangkan adanya kenyataan dihargainya moral perbedaan pendapat. (Miftah Thoha, 2010:56).

Mengenai Tujuan pemilihan umum, pendapat Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1998) dalam Didik Sukriono (2009) mengemukakan paling tidak ada tiga tujuan pemilihan umum di Indonesia, yaitu, Pertama; memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan secara damai dan tertib, Kedua; untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan ketiga; untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara. (Didik Sukriono, 2009: 20).

Istilah Tidak Memilih (*non-voters*) atau Golongan Putih dalam Pemilu, dimana pemilih memutuskan untuk tidak memilih dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu secara nasional, maupun lokal dengan sebutan Pemilukada. Mohammad Ali Andrias (2011) menyatakan, bahwa Golongan putih dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan *Non-Voters*. Mohammad Ali Andrias memaparkan pendapat Louis Desipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout (2007) yang mengkategorikan pemilih *Non-Voter* tersebut menjadi tiga kategori yakni : (a) *Registered Not Voted* ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih,; (b) *Citizen not Registered* ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih dan (c) *Non Citizen* ; mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih. (Mohammad Ali Andrias, 2011: 2).

Bismar Arianto (2011) mengemukakan Istilah golongan putih atau disingkat Golput pertama kali muncul menjelang Pemilu 1971 dalam masa pemerintahan Orde Baru di Zaman Presiden Soeharto, istilah ini sengaja dimunculkan dan diprakarsai oleh Arief Budiman, Julius Usman dan Imam Malujo Sumali. Golongan Putih menurut Arief Budiman bukan sebuah organisasi tanpa pengurus tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas. (Bismar Arianto, 2011: 53). Ada perbedaan fenomena golongan putih pada masa politik orde baru dan masa politik era reformasi. Pada masa orde baru, ajakan golongan putih dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan politik terhadap arogansi pemerintah/ABRI yang dianggap tidak menjunjung asas demokrasi. Pada era reformasi yang lebih demokratis, pengertian Golongan Putih (*non-voters*) merupakan bentuk dari fenomena dalam demokrasi.

Di negara manapun yang menjalankan sistem demokrasi, bahkan di negara yang sudah maju demokrasinya, golongan putih adalah fenomena dalam demokrasi. Golongan putih atau disebut juga *Non-voters* atau *No Voting Decision* selalu ada pada setiap pesta demokrasi di manapun terutama yang menggunakan sistem pemilihan langsung (*direct voting*). Mereka (para pemilih) dikatakan golongan putih atau *No Voting Decision* apabila berkeputusan untuk tidak memilih salah satu dari kontestan yang tersedia pada kertas suara ketika dilakukan pemungutan suara.

Ririen Ambarsari (2009) menyatakan, bahwa : “Golongan Putih merupakan hak konstitusional, hak memilih untuk tidak memilih, yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat 2, dimana, Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Golongan Putih merupakan deklarasi perlawanan dan perjuangan yang tercermin dari wajah ganda golongan putih, yaitu konfrontatif dan korektif. Melawan secara konfrontatif terjadi dalam rezim fasis-militeristik

Soeharto Orde Baru, sedangkan melawan dengan paduan korektif dan konfrontatif sekarang terjadi dalam ruang demokrasi yang dikuasai kekuatan politik-ekonomi soeharto-orbais. Golongan putih murni bukan yang terpaksa adalah salah satu cara untuk melawan ketidakadilan. (Ririen Ambarsari, 2009: 143-144).

Dalam penyelenggaraan Pemilu disebut negara demokrasi partisipasi politik pemilih sangatlah diperlukan. Pernyataan Peter L. Berger dalam Ramlan Surbakti (2007) Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. (Ramlan Surbakti, 2007 :140). Dalam hal pengelompokan pemilih (*voters*) Umar S. Bakrie dalam Maulana Kurnia (2009:1) menggolongkan pemilih menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Pemilih Rasional (*Rational Voters*) Pemilih yang berorientasi pada program kerja kontestan pemilu, baik *track - record* 5 (lima) tahun sebelumnya bagi yang sudah terpilih, dan program kerja dalam kampanye yang akan datang. Program kerja yang menjadi *concern* mereka adalah kinerja partai politik / kontestan di masa lalu (*backward looking*) dan tawaran program dari partai politik atau kontestan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi (*forward looking*). Pemilih rasional tidak begitu mementingkan ideologi dari parpol atau kontestan. Faktor seperti azas, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan, tetapi tidak signifikan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum.
2. Pemilih Kritis (*Critical Voters*)
Pemilih yang menimbang dan menyesuaikan program kerja dari para kontestan pemilu dengan nilai-nilai yang dia pakai. Buat mereka, program kerja parpol atau capres tidak saja harus sesuai dengan ekspektasi dan permasalahan yang mereka hadapi, namun juga harus selaras dengan ideologi atau sistem nilai mereka. Menurut Downs dalam Maulana Kurnia (2009) pemilih akan cenderung memberikan suaranya kepada parpol atau kontestan yang menawarkan suatu program yang memiliki kesamaan (*similarity*) dan kedekatan (*proximity*) dengan sistem nilai dan keyakinan mereka.
3. Pemilih Tradisional (*Traditional Voters*)
Pemilih yang memiliki orientasi baik kepada ideologi yang dia anut dan mungkin juga melihat ideologi partai politik yang akan dia pilih. Pemilih tradisional adalah pemilih yang memiliki orientasi ideologi dan sistem keyakinan sangat tinggi. Pemilih jenis ini sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai (*values*), asal usul (*primordial*), agama, dan faham sebagai ukuran untuk memilih parpol atau capres dalam pemilu. Mereka tidak terlalu ambil pusing dengan program kerja yang ditawarkan parpol atau calon dalam kampanye. Mereka adalah pemilih yang loyal pada ideologi atau sistem nilai yang diusung sebuah parpol atau calon.
4. Pemilih Skeptis (*Skeptis Voters*)
Pemilih yang tidak memiliki orientasi baik kepada ideologi atau sistem nilai dan program kerja yang ditawarkan partai politik atau seorang calon . Pemilih kelompok ini sudah tidak punya kepercayaan pada kontestan yang ikut pemilu, karena dia yakin bahwa siapapun yang akan menang, keadaan dan kesejahteraannya tidak akan berubah. Sebab itu buat mereka tidak ada manfaatnya datang ke TPS untuk memberikan suara. Pemilih skeptis ini potensial menjadi pemilih individu maupun kelompok Golongan Putih (*non-voters*) politis dalam pemilu. Kalaupun mereka datang ke TPS biasanya mereka asal coblos atau asal conteng.

Pengelompokan pemilih Golongan Putih, menurut Ramlan Surbakti dalam Maulana Kurnia (2009:2) menggolongkan beberapa kelas dari Golongan Putih atau kelompok *non-voters* antara lain adalah :

1. *non-voters* karena kondisi, disebabkan beberapa alasan. Karena punya pekerjaan lain ketika pemilu diselenggarakan, tidak pas waktu dengan kondisi individu pemilih, dan di Indonesia ini khususnya tidak adanya sistem *absent voting*, yaitu sistem perwakilan dengan persetujuan dari individu yang memilih;
2. *non-voters* karena tidak tahu, disebabkan oleh berbagai macam alasan;
3. *non-voters* karena skeptis, tidak percaya dengan yang dipilih;
4. *non-voters* yang masuk golongan pemilih siluman, yaitu pemilih yang meninggal dunia atau pindah tetapi masih ada dalam daftar pemilih.

Menurut Ramlan Surbakti dalam Maulana Kurnia (2009:2-3) mempertegas, bahwa Golongan putih itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Golongan putih Administratif; yakni Golongan putih yang disebabkan karena badan penyelenggara pemilu yang teledor dan karena alasan tertentu tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan suara dalam pemilihan;
2. Golongan putih Teknis; yakni Golongan putih yang disebabkan karena faktor teknis, pemilih tidak bisa datang ke TPS karena berbagai macam alasan.
3. Golongan putih Politis ; adalah orang yang secara sadar dan sengaja mengambil sikap tidak memberikan suara dalam pemilihan (memilih untuk tidak memilih); golongan putih mendekati pengertian abstain, apatis.

H. Soebagio (2008:85) memverifikasi secara empirik akan peningkatan angka pemilih yang tidak memilih (*non-voters*) atau tidak menggunakan hak pilihnya (Golongan Putih) tersebut terjadi antara lain oleh realitas sebagai berikut:

- a. Pemilu dan Pilkada langsung belum mampu menghasilkan perubahan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
- b. Menurunnya kinerja partai politik yang tidak memiliki *platform* politik yang realistis dan kader politik yang berkualitas serta komitmen politik yang berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongannya;
- c. Merosotnya integritas moral aktor-aktor politik (elit politik) yang berperilaku koruptif dan lebih mengejar kekuasaan / kedudukan daripada memperjuangkan aspirasi publik;
- d. Tidak terealisasikannya janji-janji yang dikampanyekan oleh elit politik kepada publik yang mendukungnya;
- e. Kejenuhan pemilih karena sering adanya Pemilu/Pilkada yang dipandang sebagai kegiatan seremonial berdemokrasi yang lebih menguntungkan bagi para elit politik; dan
- f. Kurang netralnya penyelenggara Pemilu/Pilkada yang masih berpotensi melakukan keberpihakan kepada kontestan tertentu, di samping juga kurangnya intensitas sosialisasi Pemilu secara terprogram dan meluas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan Metode Deskriptif dari pengolahan, analisis data, hingga pelaporan hasil penelitian. Penelitian bertempat di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam pendekatan kualitatif, tidak dilakukan penarikan sampel secara terbatas atau ditentukan terlebih dahulu atas jumlah informan. Penelitian ini menjangkau sebanyak mungkin informasi berbagai macam sumber dari informan menggunakan Sampel Betujuan (*Purposive Sample*), hingga terjadi pengulangan informasi atau kejenuhan. (Lexi J. Moleong 1989: 224-225).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, yakni menggali alasan pemilih yang menyebabkan tidak memilih (*non-voters*) di daerah sampel yang meliputi (Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Mentewe dan kecamatan Kuranji) di Kabupaten Tanah Bumbu.

Data sekunder berupa data dokumen, laporan, berita acara arsip dokumentasi Rekapitulasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 di Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Bumbu.

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara (*interview*) dibantu pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan (1) Teknik Observasi partisipan ; (2) Teknik wawancara dengan bentuk Wawancara Tak Terstruktur untuk mendalami alasan-alasan pemilih yang tidak memilih (*non-voters*).; dan (3) Teknik Dokumentasi.

Analisis Data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Basrowi & Suwandi, (2008:209-210) mencakup tiga kegiatan yang bersamaan : (1) Reduksi Data (*Data Reduction*); (2) Penyajian Data (*Data Display*) dan (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*).

Pengujian Keabsahan Data ; Hakekat keabsahan data merupakan upaya penelitian benar - benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi dan bertujuan dengan pendekatan kualitatif agar penelitian menunjukkan derajat keilmiahannya sebuah penelitian. Berkaitan dengan Keabsahan data Lexy. J. Moleong (1989:320-321) menyatakan, yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi diantaranya : (1) Mendemonstrasikan nilai yang benar; (2) Menyediakan dasar agar hal itu bisa diterapkan; dan (3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dan prosedurnya dan kenetralan dari temuan-temuan dan keputusannya. Langkah yang digunakan untuk keabsahan data diantaranya (1) Perpanjangan Keikutsertaan; (2) Ketekunan dan Keajegan Pengamatan; (3) Triangulasi; (4) Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi; (5) Analisis Kasus Negatif; dan (6) Pengecekan Anggota .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilih Tidak Memilih (*Non-voters*) Pada Pemilukada Putaran Pertama

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu telah usai diselenggarakan dalam dua putaran dan berhasil memilih, menetapkan dan melantik Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Putaran pertama tanggal 2 Juni 2010 terdapat Pemilih tidak memilih (*non-voters*) atau disebut kelompok Golongan Putih di Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 57.178 (limapuluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan) orang pemilih atau 29,5% (duapuluh sembilan koma lima persen) dari Total pemilih 193.565 (100%) terdiri dari Pemilih dalam DPT (Daftar pemilih Tetap 193.311 orang Pemilih ditambah Pemilih dari TPS –lain berjumlah 254 pemilih). Adapun rincian sebaran pemilih dalam Pemilukada tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Sebaran Partisipasi Politik Pemilih dan Pemilih Tidak Memilih (*non-voters*)
Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tanah Bumbu Putaran Pertama Tanggal 2 Juni 2010
pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Kecamatan	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Partisipasi Politik Pemilih (%)	Pemilih Tidak Memilih (%)	DPT & Pemilih TPS lain
1.	Angsana	8.221	428	8.649	2.967	11.616
2.	Kusan Hilir	22.841	864	23.705	8.612	32.317
3.	Batulicin	6.621	190	6.811	2.369	9.180
4.	Kusan Hulu	10.581	520	11.101	2.788	13.889
5.	Mentewe	10.090	481	10.571	5.059	15.630
6.	Kuranji	4.220	228	4.448	895	5.343
7.	Sungai Loban	10.570	433	11.003	2.927	13.930
8.	Karang Bintang	9.198	342	9.540	2.651	12.191
9.	Simpang Empat	28.739	1.261	30.000	14.971	44.971
10.	Satui	19.532	1.027	20.559	13.939	34.498
TOTAL		130.613	5.774	136.387 (70,5%)	57.178 (29,5%)	193.565 (100%)

Sumber :Rekapitulasi Jumlah Pemilih,Surat Suara TPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (berdasarkan model formulir DB-1 KWK) dan Lampiran Model DB-1 : KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010.

Alasan-Alasan Pemilih Tidak Memilih Pada Pemilukada Putaran Pertama

Alasan-alasan yang mendasar pemilih “Tidak memilih (*non-voters*)” pada Pemilukada (Putaran Pertama) tanggal 2 Juni 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan informan dengan sampel bertujuan (*Purposive sample*) terdapat beberapa alasan pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Persentasi Alasan-alasan Pemilih Tidak Memilih (*non-voters*) dari Hasil Wawancara Pada Tiga Kecamatan Daerah Sampel Kecamatan Saat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 2 Juni 2010 (Putaran Pertama) Di Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Alasan-alasan Pemilih Tidak Memilih (<i>Non-voters</i>)	Jumlah Informan Di Daerah Sampel	Persentasi (%)
1.	Karena Tidak percaya terhadap calon Bupati/Wk Bupati peserta Pemilukada akan bisa menepati/merealisasikan janji-janji masa kampanye untuk pembangunan daerah.	19 orang	63,3 %
2.	Karena bekerja atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga	6 orang	20 %
3.	Karena Tidak diberi Sembako, Atribut atau Uang kepada pemilih dari Janji-janji Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati	4 orang	13,4 %
4.	Alasan lain karena meninggalkan tempat karena keperluan mendadak, urusan keluarga di luar daerah,	1 orang	3,3%
Total Jumlah Informan di daerah Sampel		30 Orang	100 %

Dari alasan diatas pemilih memutuskan untuk tidak memilih (*non-voters*) dalam pemungutan suara putaran pertama Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 (2 Juni 2010) disebabkan Kekecewaan sekelompok Pemilih terhadap sebahagian anggota DPRD

yang terpilih (hasil pemilu legislatif tahun 2004 dan hasil Pemilu legislatif tahun 2009), saat masa kampanye caleg (calon anggota legislatif) dengan kendaraan Partai Politik yang diikutinya kebanyakan mengobrol janji, tidak menepati janji atau direalisasikan secara individu maupun kepada kelompok dan masyarakat pada umumnya untuk pembangunan fasilitas umum di daerah; Kekecewaan juga merambah kepada penilaian terhadap Partai Politik yang ada dan perilaku anggota DPRD yang berubah setelah duduk di DPRD dan menjadi pejabat daerah dengan gaya hidup berubah menjadi sombong (*arogansi*), pamer kemewahan (*hedonisme*), tidak suka bergaul (*individualisme*), acuh tak acuh, susah komunikasi, dan tidak menampung aspirasi masyarakat (jarang turun ke desa-desa). Selain itu belum puas menjadi anggota DPRD maju lagi menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati.

Kekecewaan sekelompok pemilih terhadap bupati dan wakil bupati periode terdahulu, dimana janji-janji kampanye atas pembangunan daerah yang tidak merata, kebanyakan pembangunan di perkotaan jika dibandingkan dipedesaan, sarana jalan, listrik dan air minum yang belum layak, serta ditambah pejabat-pejabat bawahan bupati dalam lingkup pemerintah daerah yang kurang baik dalam pelayanan terhadap masyarakat, beberapa pejabat yang terlibat korupsi, manipulasi keuangan dan terpenjara menjadi ukuran ketidakpercayaan pemilih.

Pemilih Tidak Memilih (*Non-voters*) Pada Pemilukada Putaran Kedua

Pemilukada (putaran kedua) Tanggal 16 Agustus 2010 untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat pemilih “Tidak Memilih (*non-voters*)” diseluruh Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 71.831 (Tujupuluh satu ribu delapan ratus tigapuluh satu) orang pemilih atau 37,1 % (tigapuluh tujuh koma satu persen) pemilih dari Total 193.429 (100%) terdiri dari Pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap 193.311 pemilih ditambah Pemilih dari TPS –lain berjumlah 118 pemilih). Adapun rincian sebaran pemilih dalam Pemilukada putaran kedua di Kabupaten Tanah Bumbu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Sebaran Partisipasi Politik Pemilih dan Pemilih Tidak Memilih (*non-voters*) Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Putaran Kedua Tanggal 16 Agustus 2010 Pada setiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Kecamatan	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Partisipasi Politik Pemilih (%)	Pemilih Tidak Memilih (%)	DPT & Pemilih TPS lain
1.	Angsana	8.210	293	8.503	3.116	11.619
2.	Kusan Hilir	19.881	418	20.299	12.014	32.313
3.	Batulicin	6.437	87	6.524	2.656	9.180
4.	Kusan Hulu	9.320	283	9.603	4.272	13.875
5.	Mentewe	9.163	330	9.493	6.064	15.557
6.	Kuranji	3.916	159	4.075	1.263	5.338
7.	Sungai Loban	9.634	327	9.961	3.960	13.921
8.	Karang Bintang	8.167	232	8.399	3.794	12.193
9.	Simpang Empat	26.657	599	27.256	17.695	44.951
10.	Satui	16.799	686	17.485	16.997	34.482
TOTAL		118.184	3.414	121.598 (62,9 %)	71.831 (37,1%)	193.429 (100%)

Sumber : Rekapitulasi Jumlah Pemilih, Surat Suara TPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (berdasarkan model formulir DB-1 KWK) dan Lampiran Model DB-1 : KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Putaran Kedua

Alasan-Alasan Pemilih Tidak Memilih Pada Pemilukada Putaran Kedua

Alasan-alasan yang mendasar pemilih “Tidak memilih (*non-voters*)” pada Pemilukada (Putaran Kedua) tanggal 16 Agustus 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan informan dengan sampel bertujuan (*Purposive sample*) terdapat beberapa alasan pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Persentasi Alasan-alasan Pemilih Tidak memilih (*non-voters*) dari hasil Wawancara Pada Tiga Kecamatan Daerah Sampel Kecamatan Saat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 16 Agustus 2010 (Putaran Kedua) Di Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Alasan-alasan Pemilih Tidak Memilih (<i>Non-voters</i>)	Jumlah Informan Di Daerah Sampel	Persentasi (%)
1.	Karena Tidak percaya terhadap calon Bupati/Wk Bupati peserta dalam Pemilukada akan bisa menepati/ merealisasikan janji-janji masa kampanye untuk pembangunan daerah.	19 orang	47,5 %
2.	Karena tidak ada pilihan calon Bupati / Wakil Bupati Putaran Kedua disebabkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Unggulan Kalah pada putaran pertama Pemilukada.	10 orang	25%
3.	Karena bekerja atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga	6 orang	15 %
4.	Karena Tidak diberi Sembako, Atribut atau Uang kepada pemilih dari Janji Tim Sukses CalonBupati dan Wakil Bupati	4 orang	10 %
5.	Alasan lain karena meninggalkan tempat karena keperluan mendadak, urusan keluarga di luar daerah,	1 orang	2,5%
Total Jumlah Informan di daerah Sampel		40 Orang	100 %

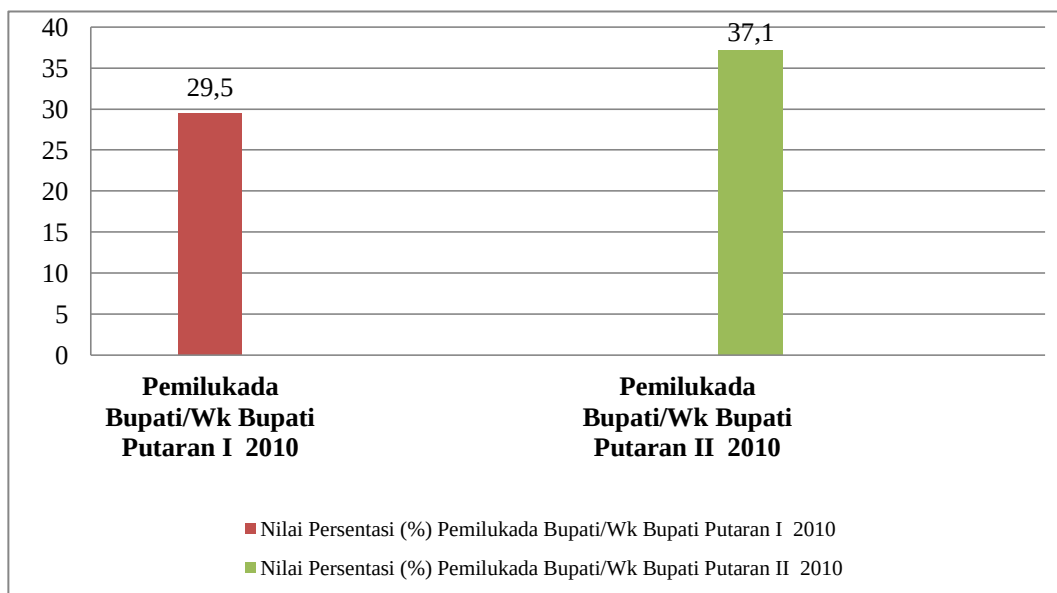
Dari tabel diatas menunjukan 47,5% kelompok pemilih mengambil sikap yang semakin tidak percaya terhadap calon Bupati ataupun Wakil Bupati yang diusung Partai Politik, maupun gabungan Partai Politik. Sikap demikian dalam Pemilukada merupakan yang berlatar belakang dari perasaan suka atau tidak suka, tetapi kelompok pemilih ini cenderung memiliki perasaan tidak suka terhadap calon dan masih kental dengan kekecewaan sebelumnya, mereka secara sengaja tidak memilih (*non-voters*). Kelompok *non-voters* kedua berada 25 % (duapuluh lima persen) menyatakan alasan mereka Tidak memilih (*non-voters*) dalam Pemungutan Suara Pemilukada putaran kedua tanggal 16 Agustus 2010 : Karena tidak ada pilihan calon disebabkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati unggulan yang mereka jagokan dan diharapkan terpilih atau harus bertarung lagi pada putaran kedua mengalami kekalahan pada Pemilukada putaran pertama tanggal 2 Juni 2010. (Kelompok pemilih tersebut saat pemilukada putaran pertama menggunakan hak pilihnya). Selebihnya menunjukan prosentasi yang rendah.

Peningkatan Pemilih Tidak Memilih (*non-voters*) Dari Dua Putaran Pemilukada

Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan jumlah dan persentasi pemilih tidak memilih (*non-voters*) atau kelompok Golongan Putih yang tidak menggunakan hak pilihnya atas kedua putaran Pemilukada tersebut sebagaimana gambar grafik berikut ini :

Gambar 2

Grafik Peningkatan Angka Pemilih Tidak Memilih (*non-voters*) Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Putaran I (pertama) 2 Juni 2010 dan Pemilukada Putaran II (kedua 16 Agustus 2010) di Kabupaten Tanah Bumbu



Gambar grafik diatas menunjukkan terdapat peningkatan kelompok pemilih tidak memilih (*non-voters*) atau Golongan Putih antara Pemilukada (putaran pertama) tanggal 2 Juni 2010 dengan Pemilukada tanggal 16 Agustus 2010 (putaran kedua) di Kabupaten Tanah Bumbu bertambah sebanyak 14.653 (empatbelas ribu enam ratus limapuluh tiga) atau (7,6%) pemilih yang tidak memilih (*non-voters*) atau tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010.

Untuk melihat peningkatan atau bertambahnya angka pemilih yang tidak memilih (*non-voters*) atas kedua putaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun 2010 yang diselenggarakan dalam dua putaran (putaran pertama tanggal 2 Juni 2010 dan putaran kedua tanggal 16 Agustus 2010) akan terlihat dalam tabel peningkatan sebaran pemilih yang tidak memilih (*non-voters*) dilihat dari peningkatan setiap kecamatan di lingkungan pemerintahan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun 2010 sebagaimana pada gambaran tabel berikut ini :

Tabel 5
Sebaran Peningkatan Pemilih Tidak Memilih (*non-voters*) atau Golongan Putih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pada Putaran Pertama 2 Juni 2010 dan Putaran kedua Tanggal 16 Agustus 2010 Disetiap kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Kecamatan	Pemilih Tidak Memilih (<i>non-voters</i>) Atau Kelompok Golongan Putih Pada Pemilukada Bupati/Wk Bupati Tanah Bumbu Tahun 2010		Jumlah Peningkatan Pemilih Tidak Memilih
		Pemilukada Putaran I Tanggal 2 Juni 2010	Pemilukada Putaran II Tanggal 16 Agustus 2010	
1.	Angsana	2.967	3.116	149
2.	Kusan Hilir	8.612	12.014	3.402
3.	Batulicin	2.369	2.656	287
4.	Kusan Hulu	2.788	4.272	1.484
5.	Mentewe	5.059	6.064	1.005
6.	Kuranji	895	1.263	368
7.	Sungai Loban	2.927	3.960	1.033
8.	Karang Bintang	2.651	3.794	1.143
9.	Simpang Empat	14.971	17.695	2.724
10.	Satui	13.939	16.997	3.058
TOTAL (%)		57.178 (29,5%)	71.831 (37,1%)	14.653 (7,6%)

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pada Pemilukada calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010:

1. Pada Putaran Pertama terdapat 57.178 (limapuluh tujuh ribu seratus tujupuluh delapan) orang pemilih atau 29,5% (duapuluh sembilan koma lima persen) pemilih tidak memilih (*non-voters*) dari Total 193.565 (100%) pemilih. Pada Pemilukada Putaran kedua terdapat 71.831 (Tujupuluh satu ribu delapan ratus tigapuluh satu) orang pemilih atau 37,1 % (tigapuluh tujuh koma satu persen) pemilih yang tidak memilih (*non-voters*) dari Total 193.429 (100%) pemilih. Berarti terjadi peningkatan sebanyak 14.653 (empatbelas ribu enam ratus limapuluh tiga) atau (7,6%) pemilih yang tidak memilih (*non-voters*) atau tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010.
2. Alasan mendasar pemilih tidak memilih (*non-voters*) pada Pemilukada putaran pertama menduduki prosentasi tertinggi adalah karena Tidak percaya terhadap calon Bupati/Wakil Bupati peserta Pemilukada akan bisa menepati/ merealisasikan janji-janji masa kampanye untuk pembangunan daerah, hal ini disebabkan sebagai kekecewaan sebelumnya terhadap kinerja anggota legislatif dan pejabat eksekutif di daerah. Selebihnya alasan bekerja atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tidak diberikan sembako, atribut atau uang dan terendah karena keperluan mendadak keluar daerah. Pada Pemilukada putaran kedua alasan mendasar pemilih tidak memilih (*non-voters*) prosentasi tertinggi adalah karena Tidak percaya terhadap calon Bupati/Wk Bupati peserta Pemilukada akan bisa menepati/ merealisasikan janji-janji masa kampanye untuk pembangunan daerah, disebabkan sebagai kekecewaan sebelumnya terhadap kinerja anggota legislatif dan pejabat eksekutif di daerah, serta alasan lain karena tidak ada pilihan calon Bupati / Wakil Bupati Putaran

Kedua disebabkan pasangan calon yang mereka unggulkan kalah pada putaran pertama Pemilukada, selebihnya alasan bekerja atau memenuhi kebutuhan ekonomi, tidak diberikan sembako, atribut dan uang dan keperluan mendadak keluar daerah.

3. Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati (Dalam Dua Putaran) Tahun 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 2 (dua) kelompok Pemilih Tidak Memilih (*non-voters*) dalam kategori atau Kelas Golongan Putih yang meliputi :
 - a. Kelompok Golongan putih Politis - Apatis sebagai peringkat tertinggi dan
 - b. Kelompok Golongan Putih Teknis sebagai peringkat sedang dan terendah.

Bertitik tolak dari temuan penelitian ini, saran-saran yang diberikan diantaranya adalah :

1. Peningkatan Sosialisasi; dari pihak penyelenggaraan Pemilu, Pemerintah Daerah dan jajarannya, Guru-guru di sekolah, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama dan Pemuka agama, mengenai kesadaran warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya dalam Pemilu/Pemilukada.
2. Bahan Introspeksi dan Pembenahan Diri; bagi pengurus dan anggota Partai politik, anggota DPRD (lembaga legislatif) dan Pemerintah Daerah dan jajarannya (Lembaga eksekutif) dan elite politik lokal, bahwa sudah terjadi Krisis Kepercayaan Masyarakat dalam bentuk atau wujud hadirnya Golongan Putih Politis-Apatis dan Kelompok Golongan Putih Teknis dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Bahan Penelitian dan Kajian Lebih Lanjut; bagi Akademisi, Peneliti, Lembaga Suvei, Kalangan Pers dan Pemerhati masalah Sosial, Politik, hukum, Sosiologi, Psikologi dan cabang Ilmu Pengetahuan Sosial lainnya, bahwa penelitian ini bisa dikembangkan lebih dalam lagi, khususnya mengenai perilaku pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada di tingkat daerah (lokal).

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, Ririen., 2009.” Antara Golput dan Kearifan Berdemokrasi Pada Pemilu 2009 Dalam Suatu Tinjauan Filosofis”. Jurnal Konstitusi, Jakarta, mitra Pusat konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang, Volume II, Juni 2009.
- Arianto, Bismar. 2011. “Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu”. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Basrowi & Suwandi, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT. Rineka Cipta .
- Budiardjo, Miriam, 1983, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Penerbit PT Gramedia.
- Hidayat, Nur, Sardini, 2011, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Yogyakarta : Fajar Media Press.
- Moleong, J, Lexy, 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif : Bandung, Edisi Revisi ke-27 Tahun 2010, PT Remaja Rosdakarya.
- Soebagio, H. 2008. “Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia”. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang 15118, Vol 12.no.2, Desember 2008, 82 -86.
- Surbakti, Ramlan, 2007, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
- Suaib, Eka, 2010, Problematika Pemutakhiran Data Pemilih di Indonesia, Depok : Penerbit Koekoesan.
- Sukriono, Didik. 2009. “Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”. Jurnal Konstitusi, Jakarta: diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI mitra Universitas Kanjuruhan Malang. Vol. II, No.1, Juni 2009.
- Thoha, Miftah, 2010, Birokrasi Politik di Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, :Jakarta, hasil Amandemen, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cetakan kedelapan, Juni 2009

Andrias, Mohammad Ali, “Pilkada dan Peluang Golput”. [online]. Tersedia : pada situs <http://mega.subhanagung.net/?p=402> Oct 09, 2011, diunduh 22 Mei 2012, jam 07.40 wita. hal. 2.

Kurnia, M., 2009. Perilaku Memilih Nonvoters (Golongan Putih) Serta Kasus Dalam Pemilu Tahun 2009, [online]. tersedia: pada situs http://fisip.uns.ac.id/blog/maulana_kurnia/2010/06/18/perilaku-memilih-da-nonvoters-golongan-putih-serta-kasus-dalam-pemilu-tahun-2009, diunduh 10 Maret 2012, jam 08.53 wita.